

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PENCABUT SINGKONG**

**(Studi Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung
Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh

DARMIAH

NPM : 1721030144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PENCABUT SINGKONG**

**(Studi Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung
Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh

DARMIAH

NPM : 1721030031

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H.A. Kumedi Ja'far,S.Ag.M.H.

Pembimbing II : H.Rohmat.,S.Ag.M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021**

ABSTRAK

Kalicinta adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Mayoritas penduduknya adalah seorang petani dan buruh, dimana pemilik kebun singkong membutuhkan jasa orang lain untuk membantu menanam, memberi pupuk, merawat, dan mencabut hasil panen singkongnya. Pada awal pemilik kebun memberikan upahnya setelah masa panen, tetapi ia hanya memberikan upahnya dengan bon-bon saja. Jika pekerja pencabut singkong tidak mengajukan bon, maka pemilik kebun tidak memberikan bonnya dan tidak semua bon yang diajukan oleh pekerja diberikan. Pada saat panen pekerja pencabut singkong tidak mengetahui berapa banyak singkong yang sudah dipanen karena pemilik kebun langsung membawa hasil panennya untuk dijual ke lapak-lapak yang biasanya ia jual. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan atas upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada pekerja pencabut singkong dan tidak adanya keterbukaan atas hasil panen singkongnya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengupahan pekerja pencabut singkong dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah pencabut singkong.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan secara induktif. Penelitian ini berjenis *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung yang dilakukan di Desa Kalicinta. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan dokumentasi mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, foto, surat kabar, majalah. Dokumen rapat dan agenda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa praktik pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta mengandung unsur ketidakjelasan terhadap nominal upah yang diberikan kepada pekerja pencabut singkong dan tidak adanya keterbukaan atas hasil panen singkong yang didapat. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja pencabut singkong salah satu syarat ujah yaitu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Namun pekerja pencabut singkong tidak rela terhadap upah yang diberikan oleh pemilik kebun, karena pemilik kebun tidak transparan terkait hasil panennya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darmiah

NIM : 1721030144

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pencabut Singkong (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis,

Darmiah



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pencabut Singkong
(Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten
Lampung Utara)
Nama : Darmiah
NPM : 1721030144
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

H.Rohmat, S.Ag.M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUPAHAN PENCABUT SINGKONG (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan
Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”. Di susun oleh Darmiah, Npm
1721030144, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan
dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Penguji Utama : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : H.Rohmat.,S.Ag.M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 1962102199930311002**

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن

ماجة)

Artinya:”Dari ‘abdallah ibnu umar katanya: rasulullah saw bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

(H.R. Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

Bissmillahirrohmaanirrohim,

skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkap rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak sugiyo dan Ibu ngatini yang selalu memberikan dukungan semangat, do'a, moril serta materiil. Karena tanpa do'a mereka tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan, kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah mengantarkanku menjadi orang yang beriman, berilmu dan bertanggung jawab.
2. Kepada kakak-kakak saya Yatiman, Surono, Nuryanti, dan Mukti Tri suningsih serta kakak ipar saya evirianti, yanti, Danuri anwar dan Yoga Kusuma yang sudah memberikan semangat, motivasi serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
3. Kepada adik-adik saya Desti, Yatno Mulyo, dan Yogi Prastyo yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat untuk saya selama menjalani studi.
4. Teman-teman seperjuangan Helen Persia Irawan, Tri Okta Fiani, Fittania Sellawati yang selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal maba sampai saat ini.
5. Untuk Geraldine Firdaus yang sudah memberikan motivasi dan semangat serta menemani dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
6. Teman-teman seangkatan (Hukum Ekonomi Syariah 2017) khususnya kelas J yang selalu memberi warna pada hari-hariku dikampus. Terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini.
7. Teman-teman KKN dan PPS Gedong Tataan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dari awal maba sampai saat ini.

8. Serta Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Darmiah, putri Kelima dari pasangan Bapak Sugiyo dan Ibu Ngatini. Lahir di Bandar Lampung, 10 Oktober 1999. Penulis memiliki saudara kandung yaitu Kakak Laki-laki, kakak Perempuan, adik Perempuan dan Adik Laki-Laki Yang bernama Yatiman, Surono, Nuryanti, Mukti Tri Suningsih, Desti, Yatno Mulyo dan Yogi Prastyo. Penulis mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Way Kandis pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014
3. Sekolah Menengah Kejuruan Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017
4. Lalu melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun 2017 dan selesai pada semester 8 tahun 2021.

Bandar Lampung, Juli 2021

Yang membuat,

Darmiah

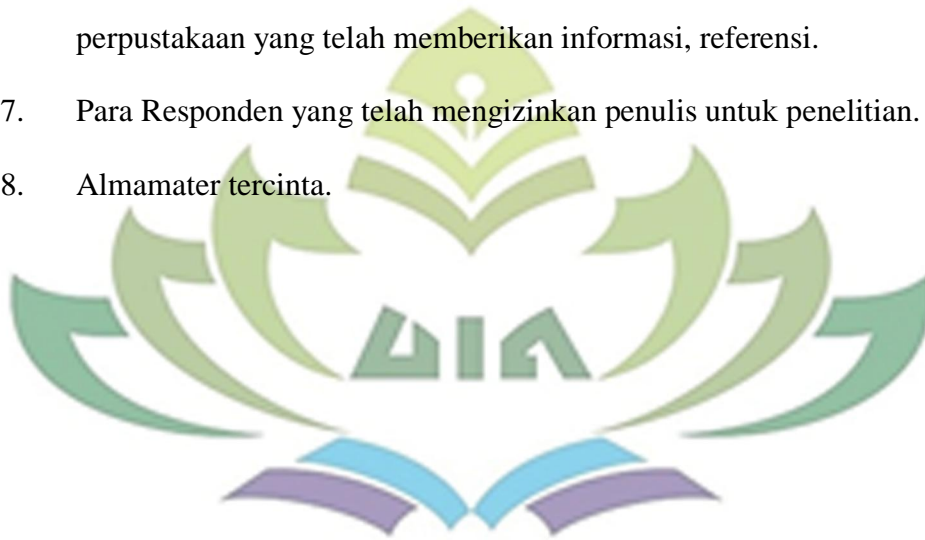
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'at dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pencabut Singkong (Studi di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri. M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas kampus.
3. Bapak Khoruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I. dan H. Rohmat., S.Ag. M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu serta memberi arahan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, referensi.
7. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.
8. Almamater tercinta.



Bandar Lampung, Juli 2021

Darmiah

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	
SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah dalam Islam (<i>Ujrah</i>)	
1. Pengertian <i>ujrah</i>	16
2. Dasar hukum <i>ujrah</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>ujrah</i>	24
4. Macam-macam <i>ujrah</i>	34
5. Hak menerima upah (<i>ujrah</i>)	42
6. Waktu pembayaran upah (<i>ujrah</i>)	45
7. Hak dan Kewajiban para pekerja	47
8. Berakhirnya akad upah (<i>ujrah</i>)	48
B. Singkong	
1. Pengertian singkong	49
2. Bagian singkong.....	50
3. Macam-macam Singkong.....	52
4. Manfaat singkong.....	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara 54
- B. Pelaksanaan Praktik Pengupahan Pencabut Singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara 62

BAB IV ANALISIS DATA

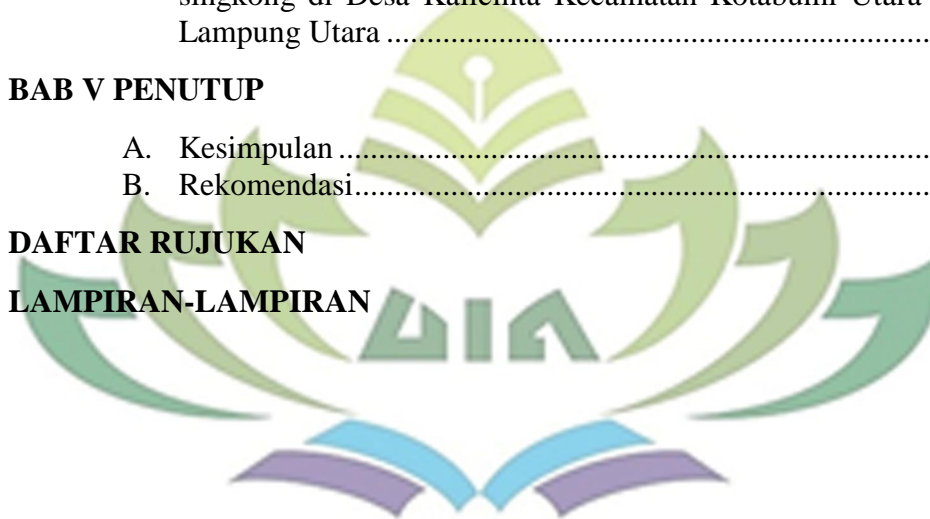
- A. Praktik pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara 68
- B. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara kabupaten Lampung Utara 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Rekomendasi..... 74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pencabut Singkong (Studi Di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)”**. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹
2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²
3. Pencabut Singkong

Pencabut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi). Sedangkan Singkong adalah jenis umbi-umbian, dengan akar dan daun yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pencabut

¹ Muhammad Rusfi, *“Filsafat Harta: prinsip Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Harta”*. Al-‘adalah vol 13 no 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), 241.

² Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), 141.

singkong adalah suatu cara atau perbuatan mencabut umbi-umbian dengan akar dan daun yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas sesuai hukum Islam terhadap praktik upah pencabut singkong di desa kalicinta kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara.

B. Latar belakang masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa membutuhkan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.³

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong karena tujuan disyariatkan *Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya dapat saling

³*Ibid.*, 243.

menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.⁴ Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya”. (Q.S Al-Maidah :2)

Berdasarkan ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain termasuk dalam upah-mengupah. Islam juga telah mengatur mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini upah dapat dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan diselesaikan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu diselesaikan.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا لَاجِرًا أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibn Majah)

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 217.

⁵ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443 (Dar Ihya’al-Kutub al-‘Arabiyyah, 2009), 816.

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkan.

Upah mengupah merupakan salah satu kerjasama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam kerjasama antara pemilik kebun singkong dengan pekerja pencabut singkong yang seharusnya upah yang diberikan sesuai dengan akad/perjanjian yang telah disepakati diawal, agar tidak merugikan salah satu pihak. Mayoritas penduduk di Desa Kalicinta sebagai buruh petani singkong, pekerja tersebut bekerja tidak terikat waktu. Tetapi pada saat menanam dan mencabut singkong mereka harus bertanggung jawab atas kebun singkong tersebut. Pemilik kebun singkong menjelaskan akan memberikan upah pada saat panen singkong. Namun pada saat panen pemilik kebun tidak segera memberikan upahnya kepada pekerja, melainkan pemilik melakukan perhitungan upah dan perhitungan modal. Singkong tersebut baru bisa dipanen ketika sudah berusia 7 sampai 8 bulan. Akan tetapi pekerja tersebut boleh berhutang kepada pemilik kebun maksimal Rp. 800.000 perbulan, hal ini tergantung pada persetujuan dari pemilik kebun.

Ketika panen juga, pemilik kebun langsung membawa hasil panen nya ke lapak penjual singkong dan tidak menimbang singkong tersebut di kebun. Hal ini menyebabkan pekerja tidak mengetahui berat hasil panen singkong

yang akan dijual. Pemilik kebun memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan perkiraannya.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai upah pencabut singkong, karena ada salah satu kejanggalan karena pemilik kebun menunda pembayaran upah kepada pekerja dan tidak adanya keterbukaan antara pemilik kebun dan pekerja. Penelitian ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Kencabut Singkong** (studi di desa kalicinta kecamatan kotabumi utara kabupaten lampung utara).

C. Fokus penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada praktik upah pencabut singkong secara hukum Islam di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan dari upah pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pengupahan dari upah pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum Islam terutama tentang praktik upah pencabut singkong.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pencabut Singkong (Studi Di Desa

Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara)” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang pertama yang ditulis oleh H. Ahmad Nur Shodik (Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dalam praktek pelaksanaan pengupahan dengan cara ditanggihkan yang terjadi di desa Rejasari ini apabila dilihat serta dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan dalam hukum Islam.
2. Penelitian terdahulu yang kedua di ambil dari skripsi Nurul Mukromah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menurut tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam, kegiatan muamalahnya

tidak bertentangan dengan syara'. Antara *mu'ajir* dan *musta'jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan diantara keduanya dan menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong dan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.

3. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni mekanisme pengupahan pekerja pencabut singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara telah menyimpang dari hukum Islam, karena pemilik kebun tidak memberikan upahnya ketika panen yang dijelaskan pada awal akad dan upah yang diberikan pemilik kebun tidak jelas nominalnya. Dalam hukum Islam salah satu syarat ujah yaitu harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Namun pekerja pencabut singkong tidak rela terhadap upah yang diberikan oleh pemilik kebun, karena pemilik kebun tidak transparan terkait hasil panennya.

H. Metode penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.⁶ yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber data penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan

⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.⁷ pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁸ data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala desa, pemilik kebun, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.⁹

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ menurut nana sudjana populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek.¹¹ adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik kebun singkong dan pekerja pencabut

⁹Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), 57.

¹¹Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.

singkong di Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sebanyak 101 orang.

b. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang akan diteliti. Bisa juga contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.¹² Pada penelitian ini ditemukan populasi yang berjumlah 101 orang yang melakukan akad upah pemilik kebun dengan pekerja pencabut singkong. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih.¹³ Karena populasi pada penelitian ini lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% populasi dapat dijadikan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *simple random sampling* yaitu teknik yang paling sederhana (*sample*). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi. Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah $11\% \times 101 \text{ orang} = 11 \text{ orang}$.

¹²Suharsimki Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 120.

¹³*Ibid.*, 270

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Editing data adalah pengecekan data pengoreksian data kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.¹⁴

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data kualitatif karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis

¹⁴ Moh.Prabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 58.

yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁵

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode deduktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus.¹⁶ metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah pencabut singkong.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

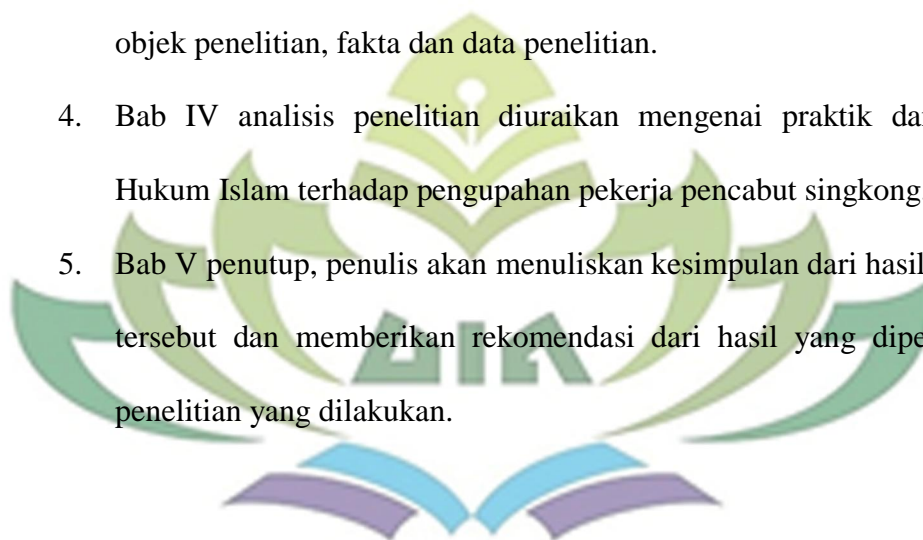
1. Bab I pendahuluan diuraikan mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

¹⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

2. Bab II landasan Teori diuraikan mengenai pengertian Upah, dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, macam-macam upah (*ujrah*), hak menerima Upah, waktu pembayaran upah (*ujrah*), berakhirnya upah (*ujrah*).
3. Bab III deskripsi objek penelitian diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, fakta dan data penelitian.
4. Bab IV analisis penelitian diuraikan mengenai praktik dan tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan pekerja pencabut singkong.
5. Bab V penutup, penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan memberikan rekomendasi dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Islam (*Ujrah*)

1. Pengertian Ujrah

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidup. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam *ujrah* (upah) berasal dari kata *al-ujru wal ujratu* yang artinya upah.¹⁷ Atau dapat di artikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.¹⁸ Ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang di dapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹⁹

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab Ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Secara terminologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-*

¹⁷ Ahmad Warso Munawir, *Al-Munawir kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 931.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 321

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 117.

ajru' yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁰ Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²¹

Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.²²

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.²³

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

²¹ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2010), 145

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 145.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 216.

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

عقد على منافع بعوض

"transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan".²⁴

2. Menurut Syafi'iyah

عقد على منفعة الادمى وبعض المقولان

"Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu".²⁵

3. Menurut Malikiyah

تسمة التعاقد على منفعة الادمى وبعض المقولان

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".²⁶

4. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

تمليك منفعة بعوض بشروط

"pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat".²⁷

5. Menurut Zuhaily bahwa *ijarah* ialah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

²⁵ *Ibid.*, 350

²⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), 114.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2001), 78.

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.²⁸

Menurut fatwa DSN MUI No.09/DSN MUI/IV/2000, *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan itu sendiri”.²⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar suatu benda dengan imbalannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa, maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan mu’amalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an dan al Hadist.³⁰

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Dalam akad *ijarah* hampir semua Ulama Fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyari’atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama tersebut Ibnu Rusyd berpendapat bahwa

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 185.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), 249.

³⁰ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ujrah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist (as-sunnah), dan Ijma'.

a. Dasar hukum *ujrah* dalam Al-Qur'an

1) Surat At-Taubah (9): 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: ١٠٥)

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. At-Taubah (9):105)

2) Surat Ar-Rum(30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُتُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٩)

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-rum(30):39)

3) Surat Al-Ahqaf (46): 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (الأحقاف: ١٩)

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaf (46):19)

4) Surat Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(البقرة: ٢٣٣)

”Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah (2):233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

5) Surat Ath-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (اطلاق: ٦)

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain

boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq(65):6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau tenaga seseorang yang disewa berhak memperoleh upah ataupun sewa atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama.

b. Hadist tentang *ujrah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثًا أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَا لَقِيََا مِمَّنْ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ آفًا سَتُوفِيْمُهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (روا البخاري)³¹

”Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabda: Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. (HR. Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْآجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)³²

”Dari Abd. Allah Ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,”Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).

Maksud dari hadis ini adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.³³

³¹ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn AlHajji, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 769

³² Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Daruun Nasyir al-Misyriyyah, t.th), 18.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَّامٍ فَقَالَ: اجْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمُهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رواه البخاري)³⁴

"Dari annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: "Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberikan imbalan sebanyak dua sha' makanan". (Riwayat Bukhari).

Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه عبد الله بن زريق)

"Dari abu sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya". (H.R. Abdurrozaq)

c. Dasar Hukum Ijma'

Mulai zaman sahabat sampai sekarang umat Islam telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan kerana sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu lebih baik.

Sebagai mana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa menyewa

³³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

³⁴ Imam Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004),

(*ijarah*) itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha masa pertama dan fuqaha negeri besar”.³⁵

Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa:”Dengan disyariatkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶

3. Rukun dan Syarat *ujrah*

a. Rukun *ujrah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuknya itu disebut rukun.³⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun *Ujrah* ada 4 (empat) yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2 (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), 165.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Cet Ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 18

³⁷ Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303

sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.³⁸ Persyaratan untuk orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai, dan dapat membedakan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) maka akad menjadi tidak sah.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sighatul-“Akad*) terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui:

- a) Ucapan
- b) Utusan dan tulisan
- c) Isyarat
- d) Secara diam-diam
- e) Dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁹

3) *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. *Ujrah* (harga sewa)/ upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

³⁹ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Tebit Terang, 2005), h.178.

upah-mengupah. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁴⁰ Islam juga mengatur upah persyaratan yang berkaitan dengan ujah (upah) sebagai berikut:

- a) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.⁴¹

⁴⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 170.

⁴¹ Gufron A. Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual (TT)*, 187.

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:⁴²

- (1) Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas daripada jumlah, sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- (2) Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan dengan buruh yang malas, sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
- (3) Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

⁴² Nurcholish madjid, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 287.

Sebagai sebuah transaksi umum, *ujrah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ujrah* adalah sebagai berikut:⁴³

a) Pelaku *ujrah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka *Al-ujrah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ujrah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

b) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 29, yang berbunyi:

⁴³ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاءُ: ٢٩)

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa :29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dalam pihak yang berakad atau pihak lain.⁴⁴

- c) Objek *al-ujrah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ujrah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- d) Objek *al-ujrah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), 232-233.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah untuk mereka, menurut mereka objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

- e) Objek *al-ujrah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- (1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.

- (2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad. Sedangkan Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

(3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

(4) Penjelasan waktu kerja Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

(5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat sahnya *ujrah* ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

- c) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut *syara'*.
- d) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat)
- e) Kemanfaatannya adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.⁴⁵

b. Syarat Upah (*ujrah*)

Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.⁴⁶
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁴⁷ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.⁴⁸

Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur ketidak pastian.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah* jilid 12 terj. Kamaludin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 19

⁴⁶ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif etika politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

⁴⁷ *Ibid.*, 186.

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat*, (Semarang: Asy-syifa, 1990), 231.

Ujrah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ujrah* tersebut sepanjang ukuran upah yang di maksudkan dan dapat di ketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴⁹
- 5) Berupa harta tetap yang dapat di ketahui, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam pengupahan para pekerja.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, 391.

⁵⁰ *Ibid.*, 129.

Apabila syarat-syarat upah-mengupah diatas telah terpenuhi, maka akad upah mengupah telah dianggap sah menurut syara'. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka upah mengupah dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan adalah *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam memenuhi syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan.

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Dalam fiqih mu'amalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵¹

Dilihat dari segi objeknya, *ujrah* dibagi menjadi dua:

⁵¹ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67

1) *Ujrah* manfaat (*al-ujrah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir* dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka perlu ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad senya-menyewa.

2) *ujrah* yang bersifat pekerjaan (*al-ujrah al-a'mal*)

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Upah seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga atau jasa dari *mus'tajjir*.⁵²

Jika *ujrah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak

⁵² *Ibid.*, 236.

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam Q.S. An-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (التَّحْل: ٩٠)

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S An-Nahl (16):90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban si majikan adalah untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Al-ujrah* terbagi menjadi dua, yaitu:⁵³

a) *Ujrah* khusus

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf), 361.

Yaitu *ujrah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A memperkerjakan B, selama B bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai. Dalam arti lain *ujrah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b) *Ujrah Musytarik*

Yaitu *ujrah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas-asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:⁵⁴

(1) Asas Ibadah (*Mabda 'al-ibadah*)

Asas ini merupakan “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83-92

(2) Asas kebebasan berakad (*Mabda' Huriyyah at-Ta'qud*)

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ
 أَلَّا تَنْعَمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (الْمَائِدَةُ : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah (5): 1)

(3) Asas Konsensualisme (*Mabdu' ar-Radha'iyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

(4) Asas janji itu mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia, dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَرَمٌ مَسْئُولًا (الْإِسْرَاءُ: ٣٤)

”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”. (Q.S Al-Isra’ (17): 34)

(5) Asas keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun al-mu’wadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangandalam memikul resiko. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kelaziman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁵⁵

(6) Asas Kemaslahatan

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009), 33.

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

(7) Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.⁵⁶

(8) Asas Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.⁵⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ

⁵⁶ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, et. Ke-2, (Jakarta: kencana, 2006), 37.

⁵⁷ *Ibid.*, 33.

لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
(الْمَائِدَة: ٥)

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah (5):8).

5. Hak menerima Upah (*ujrah*)

Hak upah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan penangguhannya dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl (16) :90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النَّحْل: ٩٠)

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl (16) :90).

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada

pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah layak. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Dalam *ijarah*, apabila upah telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan, apabila belum disebutkan maka upahnya bisa disebutkan upah yang sepadan. Oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: pertama, upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) kedua, upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajru al-musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima). Kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Selain itu, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari yang telah disebutkan sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Adapun upah yang sepadan (*ajru al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya, apabila akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa kerjanya. Upah yang

sepadan tersebut bisa jadi merupakan upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja, apabila akad ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.⁵⁸

Untuk menentukan upah yang sepadan atau pantas (*ajru al-mitsli*) itu sebenarnya sulit, karena ukuran kepantasan upah kerja itu relatif, yang dipandang pantas oleh *musta'jir* seringkali masih belum dipandang pantas oleh *ajir*, sehingga masih sering terjadi tawar menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan.

Tidak adanya pembatasan cara-cara ini adalah dikarenakan upah tersebut juga berbeda-beda menurut situasi dan perbaharui oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Faktor-faktor inilah yang oleh para ahli hukum Islam dijadikan dasar dalam menentukan upah yang sepadan atau pantas, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Q.S Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُ أٰخَرٰى (الطلاق: ٦)

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

⁵⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S Ath-Thalaq (65): 6)

Ada perbedaan upah di antara berbagai tingkatan pekerja adalah dikarenakan adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materil.⁵⁹

Adapun yang menjadikan pijakan untuk memperkirakan upah adalah jasa, bukan berdasarkan hasil seorang *ajir*, serta tidak diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Atas dasar inilah para ahli menentukan upah seorang *ajir* dengan memperhatikan nilai jasanya ditengah masyarakat. Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan nilai jasa tersebut dalam masyarakat, maka tidak bisa ditentukan dengan argumentasi atau *hujjah* tertentu, melainkan cukup dengan pendapat para ahli. Ahli yang memperkirakan upah tersebut hendaknya dipilih oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak *musta'jir* dan *ajir*. Apabila kedua belah pihak belum memilih seorang ahli atau masih berselisih maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.⁶⁰

6. Waktu pembayaran Upah (*Ujrah*)

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan undang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberi upah

⁵⁹ Mohammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 117.

⁶⁰ Taqiyuddin An-Nabanni, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 104.

dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.⁶¹ Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHperdata “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayarkan sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dikerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatunya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban

⁶¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 41.

kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan yang zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).⁶²

7. Hak dan Kewajiban Para Pekerja

Perjanjian/akad, termasuk akad upah-mengupah/*ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini adalah hak-hak dan kewajiban para pekerja dalam *ijarah*.⁶³

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
- d. Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas
- b. Benar-benar bekerja sesuai waktu perjanjian
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti

⁶² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 874.

⁶³ *Ibid.*, 237.

- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan. Adanya wanprestasi bisa menyebabkan pembatalan perjanjian dan dalam hal-hal tertentu, bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.⁶⁴

8. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

- a. Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan hanya berlaku untuk benda yang di miliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ujrah* merupakan *milik al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat di wariskan.
- b. Sesuatu yang di ijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

⁶⁴ *Ibid.*, 48.

d. Akad berakhirnya *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqala* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya adalah terdapat aib pada benda yang di sewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.⁶⁵

B. Singkong

1. Pengertian Singkong

Singkong disebut juga ubi kayu atau ketela pohon. Pengolahan dari singkong cukup beragam mulai dari makanan tradisional seperti getuk, timus, keripik, gemblong, dan berbagai jenis makanan lainnya yang memerlukan proses lebih lanjut. Pengolahan singkong dapat di golongan menjadi tiga yaitu hasil fermentasi singkong seperti tape atau peuyem, singkong yang di keringkan seperti gaplek, dan tepung singkong atau tepung tapioka.⁶⁶

Ubi kayu atau singkong adalah tanaman dikotil satu yang di tanam untuk di ambil patinya yang sangat layak cerna. Sebagai tanaman semak belukar tahunan, ubi kayu tumbuh 1-4 meter dengan daun besar yang menjari dengan 5 atau 9 belahan lembar daun. Daunnya yang bertangkai panjang bersifat cepat layu yang berumur paling lama hanya beberapa

⁶⁵ *Ibid.*, 284.

⁶⁶ Veronika Indah Septiriyani, "Potensi Pemanfaatan Singkong (*Manihot utilissima*) sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es Puter secara Tradisioanal", (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017) [skripsi], 7.

bulan. Batangnya memiliki pola percabangan yang khas dengan pertumbuhan tegak batang yang memudahkan untuk penyiangan.⁶⁷

Suhu udara minimal bagi tumbuhnya ketela pohon sekitar 100⁰C, bila suhunya di atas 100⁰C menyebabkan pertumbuhan tanaman sedikit terhambat, menjadi kerdil. Kelembaban udara optimal untuk tanaman ketela pohon antara 60%-65%. Sinar matahari yang di butuhkan bagi tanaman ketela pohon sekitar 10 jam/hari terutama untuk kesuburan daun dan perkembangan umbinya. Tanah yang sesuai dengan ketela pohon adalah tanah yang bertekstur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros serta kaya bahan organik. Tanah dengan tekstur remah mempunyai tata udara yang baik.

2. Bagian singkong

Menurut BALITKABI (Badan Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi) bagian tumbuhan tanaman singkong atau ketela pohon terdiri atas batang, daun, bunga dan umbi. Berikut akan di uraikan masing-masing bagian:⁶⁸

a. Batang

Batang tanaman singkong berkayu, beruas-ruas dengan ketinggian mencapai 3 meter. Warna batang kayu bervariasi, ketika masih muda umumnya batang ubi kayu berwarna hijau dan setelah tua menjadi keputih-putihan, kelabu atau hijau atau coklat kelabu. Di dalam batang berisi empulur berwarna putih lunak dan strukturnya

⁶⁷ LIPI Bogor, "*Tanaman Pekarangan*", (Jakarta: PN Balai Pustaka), 19.

⁶⁸ Endrika Widyastuti, *karakteristik umbi-umbian*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2002, 378.

empuk seperti gabus. Panjang ruas buku bervariasi tergantung pada gen, umur tanaman, dan faktor lingkungan seperti ketersediaan air dan cahaya.

b. Daun

Susunan daun ubi kayu pada batang berbentuk $2/5$ spiral. Lima daun berada dalam posisi melingkar membentuk spiral dua kali di sekeliling batang. Daun berikutnya atau ke enam terletak persis di atas titik spiral. Helai daun mempunyai permukaan yang halus dan berbentuk jari, jumlah jari bervariasi antara 3 sampai 9 helai. Warna helai daun juga bervariasi ada yang hijau dan juga yang berwarna ungu. Bentuk helai daun terutama lehernya juga bervariasi tergantung pada varietasnya.

c. Bunga

Tanaman ubi kayu memiliki bunga, bunga ubi kayu berumah satu (*monoceus*) dan proses penyerbukannya bersifat silang, penyerbukan tersebut akan menghasilkan buah yang berbentuk agak bulat. Di dataran rendah tanaman ubi kayu jarang berbunga.

d. Umbi

Umbi kayu atau singkong terbentuk dari akar yang berubah bentuk dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya bulat memanjang, daging umbi mengandung pati. Umbi pada singkong terdiri atas kulit luar yang tipis berwarna kecoklatan atau kekuningan, kulit dalam agak tebal

berwarna keputihan dan basah serta umbinya berwarna putih gelap atau kuning gelap.

3. Macam-macam singkong

a. Singkong Emas

Singkong emas adalah tanaman singkong rekayasa dimana bibit singkong lokal dikawinkan dengan bibit singkong yang berasal dari negeri Gajah putih Thailand. Ubi kayu ini dikenalkan pertama kali di Bengkulu. Jika bibit ini di tanam pada lahan seluas satu hektar, maka singkong emas ini dapat menghasilkan sekitar 150-300 ton singkong. Sedangkan masa panen singkong ini tergolong cepat yaitu di usia 7 bulan.

b. Singkong Gajah

Singkong gajah ini memiliki ukuran lebih besar bahkan paling besar jika di bandingkan dengan jenis singkong lainnya, dan alasan itulah singkong jenis ini di sebut dengan nama singkong gajah. Singkong berasal dari Kalimantan Timur ini memiliki diameter lebih dari 8cm. Umumnya, jika singkong gajah di tanam pada lahan seluas satu hektar, maka hasil panennya antara 150-200 ton/hektar.

c. Singkong Manggu

Singkong manggu ini berasal dari Jawa Barat, singkong jenis ini memiliki ukuran kecil dengan diameter batang 4-5 cm. Rata-rata hasil panen singkong manggu antara 75-100 ton/hektar. Kunggulan dari singkong manggu ini selain bebas dari zat-zat berbahaya bagi tubuh,

tetapi juga mudah untuk di tanam, kulit ubi mudah di kupas serta tekstur daging empuk dan renyah. Dalam satu batang biasanya menghasilkan ubi sekitar 5-7 kg.

d. Singkong Mukibat

Singkong Mukibat adalah singkong yang berasal dari Jawa Timur. Singkong ini di temukan oleh petani di Desa Ngadiluwih kabupaten Kediri yang bernama Mukibat. Sesuai dengan nama penemunya, ketela pohon ini pun diberi nama singkong Mukibat. Singkong Mukibat di temukan dari hasil okulasi atau biasa disebut penyambungan antar batang. Namun, singkong ini umumnya hanya diambil patinya untuk di olah menjadi bioetanol atau bahan bakar yang berasal dari tanaman. Masa panen jenis singkong ini pada usia sekitar 13 bulan sejak masa panen.⁶⁹

4. Manfaat singkong

- a. Penambah energi
- b. Membantu mencegah sembelit
- c. Membantu mengendalikan kadar gula darah
- d. Kaya akan mineral yang menjadi fungsi jaringan tubuh
- e. Bermanfaat untuk kulit
- f. Menurunkan resiko sindrom metabolik
- g. Mencegah sel kanker

⁶⁹ N.R. Firdaus, *karakteristik Morfologi dan fisikomia Ubi Kayu Lokal (manihot Esculenta Crantz)*, Padang: Fakultas pertanian Universitas Andalas, 55.

h. Merupakan sumber serat dan karbohidrat kompleks⁷⁰



⁷⁰ Sulusi Prabawati dkk, *Manfaat Singkong*, (Bogor: Badan Litbang Pertanian, 2011), 241.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Daruun Nasyir al-Misyriyyah. t.th.
- Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Amin,A. Riawan. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Arikunto, Suharsimki. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- A.mas'adi, Ghufra. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Data dokumentasi Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Firdaus, N.R. *karakteristik Morfologi dan fisikomia Ubi Kayu Lokal (manihot Esculenta Crantz)*, Padang: Fakultas pertanian Universitas Andalas.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: kencana. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm. 1981.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mega Pratama. 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat*. Semarang: Asy-syifa. 1990.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2001.

- Ifham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn AlHajj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2003.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1991.
- LIPI Bogor. "*Tanaman Pekarangan*". Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet 2*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta. 2015.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443. Dar Ihya'al-Kutub Al-'Arabiyah. 2009.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. No 2227. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Moh. Saefulloh. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Tebit Terang. 2005.
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma. *menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu Surwadi, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Prabawati, Sulusi dkk. *Manfaat Singkong*. Bogor: Badan Litbang Pertanian. 2011.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.

- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Transaction Law in Business dari teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Rusfi, Muhammad. “*Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Harta*”. *Al-‘Adalah* Vol 13 No 2. Bandar Lampung: Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung. 2016.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2. Semarang: Muktabah Usaha Keluarga. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah”*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1. Bandung: PT. Alma’arif. 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif etika politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos. 1999.
- Septiriyani, Veronika Indah. “Potensi Pemanfaatan Singkong (*Manihot utilissima*) sebagai bahan tambahan dalam pembuatan es Puter secara Tradisioanal”. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2017.
- Syarifudin. Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Sudjana, Nana. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Suhendi, Hendi. *fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Suparno. *Wawancara dengan penulis*. Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Tanggal 24 Agustus 2020.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.

Ru'fah, Abdullah. *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia. 1999.

Widyastuti, Endrika *karakteristik umbi-umbian*. Malang: Universitas Brawijaya. 2002.

Undang-undang

Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Syariah.

Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Wawancara

Daud. Wawancara dengan penulis. 20 Mei 2021

Herman. Wawancara dengan penulis 23 Mei 2021

Misrun. Wawancara dengan penulis. 23 Mei 2021

Robi. Wawancara dengan penulis. 23 Mei 2021

Sulaiman. Wawancara dengan penulis. 20 Mei 2021

Suyono. Wawancara dengan penulis. 20 Mei 2021

Somad. Wawancara dengan penulis. 20 Mei 2021

Syarif. Wawancara dengan penulis. 23 Mei 2021

Untung. Wawancara dengan penulis. 20 Mei 2021

Wawan. Wawancara dengan penulis. 23 Mei 2021

Yadi. Wawancara dengan penulis. 23 Mei 2021